

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan pariwisata perlu mengacu pada beberapa indikator, yaitu pengelolaan fasilitas, aksesibilitas, promosi, kemitraan, pemberdayaan, dan kelestarian alam serta budaya. Uraian tersebut dapat menjadi parameter atau tolak ukur sejauh mana suatu destinasi wisata yang dapat menciptakan peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal (Anandhyta & Kinseng, 2020). Setiap daerah yang memiliki potensi pariwisata dan akan mengembangkan pariwisata harus memenuhi fasilitas penunjang, memudahkan akses wisata, melakukan promosi, melakukan kemitraan dengan *stakeholder*, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat (Han, 2021).

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok lemah. Fasilitator perlu memahami dan memilih metode pemberdayaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada suatu kelompok masyarakat. Terdapat metode pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipatif yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat pada proses kegiatan yang menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap kegiatan sehingga tercipta kemandirian (Riyadi et al., 2022).

Beberapa bentuk penerapan pendekatan partisipatif yang bisa dilakukan adalah *Rapid Rural Appraisal* (RRA), *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) dan

*Focus Group Discussion* (FGD). Pemilihan metode tersebut dapat disesuaikan dengan faktor internal maupun eksternal seperti peran *stakeholder*, permasalahan yang dihadapi, dan kesiapan serta kondisi masyarakat itu sendiri (Mardikanto, 2019). Melalui penerapan pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan tersebut, terlibatnya masyarakat melalui peran aktif publik terhadap suatu program atau kegiatan menjadi salah faktor keberhasilan keberhasilan pemberdayaan sehingga pemberdayaan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat (Muliawati, 2021).

Kemandirian sebagai tujuan akhir dari pemberdayaan tercantum dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan komunitas untuk mencapai kapasitas dan kemandirian. Pada konteks mencapai kemandirian, partisipasi masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan pemberdayaan. Masyarakat yang terlibat dalam suatu kegiatan merupakan sasaran kebijakan yang harus mampu mengembangkan dan memposisikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki (Noviana Ira, Susilo Kristyan Dwijo, 2023).

Pada konteks sektor pariwisata, partisipasi berperan untuk menciptakan keberlanjutan sesuai dengan pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pembangunan destinasi pariwisata dilaksanakan untuk menciptakan daya saing yang tinggi dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai hal tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Partisipasi masyarakat merujuk pada sejauh mana masyarakat ikut andil dalam segala proses pengembangan potensi pariwisata di suatu daerah yang memiliki sumber alam memadai (Siregar, 2022). Peran tersebut dapat berupa pemberian aspirasi masyarakat, dukungan, dan komitmen. Masyarakat merupakan aktor yang berperan penting dalam menciptakan sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Pada konteks ini, pengembangan potensi pariwisata perlu dilakukan dengan menarik partisipasi masyarakat. Sebagai pihak yang paling memahami keadaan lingkungan serta potensi pada suatu daerah, pengembangan pariwisata dengan menarik masyarakat untuk berpartisipasi dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Asy'ari et al., 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata memerlukan persepsi dan pemahaman yang sama (Tandilino & Meko, 2020). Persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari pengembangan potensi wisata sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan potensi pariwisata itu sendiri. Jika masyarakat sudah memegang kendali penuh atas pelaksanaan seluruh kegiatan maka keberlanjutan potensi pariwisata sangat bergantung terhadap partisipasi dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan para *stakeholders* dalam proses perencanaan hingga implementasi kegiatan memang sangat penting, namun masyarakat adalah aktor kunci dari keberlanjutan kegiatan tersebut. Masyarakat juga sekaligus menjadi media bagi wisatawan dalam menikmati pariwisata di suatu wilayah. Jika persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai pengembangan potensi pariwisata masih belum sama antara satu individu dan individu lain maka proses pengembangan potensi pariwisata tidak akan berjalan semestinya (Asy'ari

et al., 2021). Masyarakat yang terlibat dalam suatu kegiatan merupakan sasaran kebijakan yang harus mampu mengembangkan dan menempatkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki (Noviana, 2023).

Prinsip partisipatif dalam pemberdayaan desa wisata tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah. Pemberdayaan tersebut dilakukan guna menyejahterakan masyarakat Desa Wisata. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan potensi pariwisata adalah masyarakat, menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata sangat penting. Partisipasi masyarakat merujuk pada sejauh mana masyarakat ikut andil dalam segala proses pengembangan potensi pariwisata di suatu daerah yang memiliki sumber alam memadai.

Hubungan partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata merupakan salah satu strategi pemberdayaan pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Pekalongan No. 52 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan di Kabupaten Pekalongan meliputi; (1) Penguatan kemampuan dan potensi lokal dengan mengembangkan kegiatan bisnis yang produktif di sektor pariwisata, (2) Perkuatan kerja sama antar usaha di sektor pariwisata, (3) Meningkatkan pemahaman dan partisipasi bersama para *stakeholder*, dan (4) Penguatan motivasi dan kapasitas masyarakat untuk memahami bangsa dan tanah air melalui kegiatan wisata.

Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari Jawa Tengah yang memiliki 285 desa dan kelurahan. Perbedaan topografi wilayah menyebabkan terdapat 11

desa di Kabupaten Pekalongan yang merupakan desa pantai, 66 desa bertempat pada dataran tinggi, dan 219 desa bertempat pada dataran rendah. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu wilayah yang memiliki keberagaman potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk pengelolaan potensi pariwisata. Oleh sebab itu, Kabupaten Pekalongan senantiasa memastikan kegiatan dalam memaksimalkan potensi pariwisata guna memastikan keberlangsungan untuk jangka panjang (Pristiansyah et al., 2022). Peluang tersebut menjadi dorongan bagi Kabupaten Pekalongan untuk mengembangkan potensi wisata.

**Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan**

| NO | INDIKATOR CAPAIAN                            | 2017      | 2018      | 2019        | 2020      |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1  | Jumlah kunjungan wisatawan (orang)           | 129.542   | 140.430   | 236.244     | 115.756   |
| 2  | Pendapatan sektor pariwisata (Rp.ribu/tahun) | 600.358,5 | 667.865,5 | 1.697.036,5 | 802.135,5 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026, diolah penulis

Terjadi penurunan jumlah kunjungan yang drastis akibat Pandemi Covid-19, namun jika dilihat berdasarkan angka pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan sektor pariwisata sehingga Kabupaten Pekalongan tetap memiliki peluang dalam meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata melalui pengembangan pariwisata untuk kembali mengundang lebih banyak wisatawan.

Pariwisata adalah satu dari banyaknya sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

menaungi urusan kepariwisataan Kabupaten Pekalongan adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Pada konteks tersebut, perlu dilakukan pembaruan serta penetapan kebijakan dalam rangka mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Pekalongan. Dalam menangani hal tersebut, Kabupaten Pekalongan menetapkan beberapa desa sebagai Desa Wisata Rintisan. Pada tahun 2021, Bupati Kabupaten Pekalongan menetapkan enam Desa Wisata Rintisan dengan Surat Keputusan Bupati Pekalongan.

**Tabel 1. 2 Desa Wisata Rintisan Kabupaten Pekalongan**

| NO | NAMA DESA WISATA RINTISAN | KECAMATAN     | NOMOR SK BUPATI | TANGGAL SK BUPATI |
|----|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Tlogopakis                | Petungkriyono | 556/80/2021     | 5 Februari 2021   |
| 2  | Lolong                    | Karanganyar   | 556/126/2021    | 31 Maret 2021     |
| 3  | Kayupuring                | Petungkriyono | 556/127/2021    | 31 Maret 2021     |
| 4  | Lemah Abang               | Doro          | 556/128/2021    | 31 Maret 2021     |
| 5  | Karanggondang             | Karanganyar   | 556/129/2021    | 31 Maret 2021     |
| 6  | Kasimpar                  | Petungkriyono | 556/130/2021    | 31 Maret 2021     |
| 7  | Tlogohendro               | petungkriyono | 556/131/2021    | 31 Maret 2021     |

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diolah penulis

Kebaruan pada pemilihan Desa Lolong merujuk pada sudah terdapatnya beberapa penelitian terdahulu yang membahas tingkat partisipasi masyarakat pada empat dari tujuh desa tersebut, yaitu Desa Tlogopakis, Desa Kayupuring, Desa Kasimpar, dan Desa Tlogohendro. Desa Lemah Abang dan Desa Karanggondang hanya memiliki daya tarik wisata alam. Desa Lolong mempunyai daya tarik dan atraksi pada jenis wisata lain, yaitu buatan dan budaya (Nahrowi, 2022). Keberagaman jenis wisata dan fasilitas berakibat pada peningkatan kunjungan

wisatawan (Naibaho, 2023). Berdasarkan uraian tersebut maka Desa Wisata Lolong dipilih sebagai lokus pada penelitian ini.

**Tabel 1. 3 Jumlah Wisatawan Desa Wisata Lolong**

| <b>Wisata<br/>Tahun</b> | <b>Lolong<br/><i>Adventure</i></b> | <b>Bumi<br/>Perkemahan</b> | <b>Kebun<br/>Durian<br/>dan Cafe</b> | <b>Wisata<br/>Edukatif<br/>Taman Soko<br/>Langit</b> |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>2022</b>             | 1,684                              | 12,765                     | 8,768                                | 5,225                                                |
| <b>2023</b>             | 665                                | 24,956                     | 4,492                                | 3,140                                                |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan

Topografi Desa Lolong yang terletak dekat pada pegunungan membuat sumber daya alam lokal dapat dimanfaatkan untuk penciptaan atraksi pariwisata. Adapun fokus bagian wisata lolong adalah Lolong *Adventure*, bumi perkemahan, wisata edukasi, dan hasil bumi lokal. Sumber daya yang ada pada Desa Wisata Lolong dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat dengan menyediakan fasilitas atraksi pariwisata. Pada kurun waktu tersebut, terjadi penurunan jumlah wisatawan pada tiga dari empat atraksi wisata di Desa Wisata Lolong. Kurangnya keterlibatan penduduk sekitar pada suatu kegiatan pengembangan objek wisata akan memengaruhi minat kunjung wisatawan (Randy, 2024).

Tiap objek wisata Desa Lolong memiliki jumlah wisatawan yang cukup besar, dua atraksi wisata yang menjadi daya tarik utama adalah Lolong *Adventure* dan Festival Durian Lolong. Lolong *Adventure* merupakan organisasi legal yang sudah terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0011736.AH.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lolong *Adventure*. Desa Lolong memiliki hasil bumi yang melimpah.

Demi memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah desa mengadakan “Festival Durian Lolong” yang dilaksanakan setiap tahunnya. Festival durian adalah salah satu atraksi yang menarik wisatawan untuk datang dan menikmati hasil bumi Desa Wisata Lolong.



**Gambar 1. 1 Festival Durian Lolong Tahun 2024**

*Sumber: Dokumentasi Penulis*

Adanya organisasi kepemudaan Lolong *Adventure* yang sudah berdiri sejak 2011 dan Festival Durian Lolong yang sudah diselenggarakan rutin sejak 2010 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lolong telah menyadari potensi sumber daya dan mampu memaksimalkan sumber daya tersebut jauh sebelum dikeluarkannya SK Bupati No. 556/126/2021. Pencapaian Desa Lolong dalam menarik wisatawan dinilai baik karena atraksi wisata tersebut sudah dikelola jauh sebelum dikeluarkannya SK Bupati mengenai ditetapkannya Desa Lolong sebagai Desa Wisata.

Masalah yang muncul adalah pengelolaan yang tidak bersinergi dalam mengelola atraksi pariwisata di Desa Wisata Lolong. Manajemen pengelolaan atraksi wisata pada Desa Wisata Lolong dilakukan secara tidak terikat dengan

manajemen atraksi wisata lain. Semestinya, pengelolaan desa wisata harus dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan antara satu pihak sama lain.

**Tabel 1. 4 UMKM Desa Lolong**

| No    | Jenis Usaha | Jumlah | Keterangan    |
|-------|-------------|--------|---------------|
| 1     | Konveksi    | 7      | Milik pribadi |
| 2     | Pariwisata  | 2      | Milik pribadi |
| 3     | Meubel      | 2      | Milik pribadi |
| 4     | Lain-Lain   | 2      | Milik pribadi |
| Total |             | 13     |               |

*Sumber: Pemerintah Desa Lolong*

Jumlah UMKM menunjukkan ketersediaan infrastruktur, barang, jasa, dan sarana prasarana penunjang pariwisata yang digunakan untuk mendukung pengembangan desa wisata (Siregar, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa jenis UMKM pariwisata memiliki jumlah yang paling sedikit dibanding jenis UMKM lain. Adanya perbedaan angka yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit dari masyarakat yang tertarik untuk melakukan usaha pada jenis usaha pariwisata. Hal ini merujuk pada fakta bahwa pengelolaan pariwisata pada Desa Wisata Lolong dilakukan oleh pihak dan investor dari luar desa sehingga tidak ada sinergi keterlibatan masyarakat pada pengembangan maupun pengelolaannya.

Habibi (2022) menjelaskan bahwa sinergi dalam pengembangan desa wisata adalah hal yang krusial, di mana masyarakat, pihak desa, dan pihak lainnya memiliki peran masing-masing untuk mendukung proses tersebut. Masyarakat berperan sebagai pendukung utama keberhasilan desa wisata. Ketika sinergi ini

terjalin maka pengembangan desa wisata dapat tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan.

Sinergi tersebut mencakup beberapa *stakeholder*, salah satunya adalah masyarakat. Pada konteks tersebut, masyarakat memiliki peran pada pengembangan desa wisata, yaitu menunjang kesuksesan pengembangan desa wisata. Hal tersebut karena penduduk lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi dan situasi sumber daya lokal sehingga mempunyai tugas penting dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah Desa Wisata Lolong rutin melakukan rapat dan pertemuan yang dihadiri oleh berbagai *stakeholders* termasuk masyarakat. Pelaksanaan rapat dan pertemuan tersebut dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pada suatu periode.

**Tabel 1. 5 Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Rapat Koordinasi  
Desa Wisata Tahun 2023**

| <b>Kehadiran<br/>Rapat</b>                       | <b>Jumlah<br/>Kehadiran<br/>Keseluruhan<br/>(Wajib Hadir)</b> | <b>Jumlah<br/>Kehadiran<br/>Masyarakat</b> | <b>Persentase<br/>Kehadiran<br/>Masyarakat</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Wisata        | 67                                                            | 6                                          | 9%                                             |
| Rapat Koordinasi Pelaksanaan Atraksi Desa Wisata | 50                                                            | 15                                         | 30%                                            |

Sumber: Pemerintah Desa Lolong

Data tersebut menunjukkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam satu periode pada perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai program dan kegiatan pengembangan Desa Wisata Lolong. Masyarakat yang menghadiri rapat koordinasi tersebut didasarkan pada keinginan dan keuntungan dari kegiatan atraksi wisata dan bukan didasarkan pada pembagian wewenang yang formal. Pada umumnya, pelaksanaan pembagian wewenang tersebut dikoordinasikan oleh pihak yang mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan internal desa wisata (Endang, 2021). Rapat tersebut merupakan media bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi mengenai pengembangan desa wisata yang termasuk dalam partisipasi pikiran (Hamada & Gina Puspitasari, 2022).

Pada konteks ini, pihak tersebut adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis Durian Mas Desa Lolong telah lama tidak aktif sehingga pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah desa bersama pihak pengelola tiap-tiap atraksi pariwisata yang berdiri secara mandiri. Murianto (2020) menyatakan pentingnya pembagian wewenang oleh Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata, bahwa pokdarwis merupakan garda terdepan dalam pengembangan desa wisata. Pelaksanaan pembagian tugas dilakukan pada tahap perencanaan hingga evaluasi pada seluruh program pengembangan atraksi wisata. Pembagian tugas tersebut dapat menciptakan kontribusi masyarakat dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas produk wisata.

Penduduk Desa Wisata Lolong berjumlah 2.166 jiwa dengan mayoritas pekerjaan adalah petani. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa mayoritas penduduk Desa Lolong berada pada usia produktif, yaitu berjumlah 1.405 jiwa atau

64,87% adalah usia 16-65 sehingga seharusnya mudah untuk Pemerintah Desa Lolong untuk membuat Pokdarwis Durian Mas Desa Lolong menjadi organisasi yang aktif sehingga memudahkan dalam mengumpulkan tenaga melalui partisipasi masyarakat mengingat terdapat banyak penduduk Desa Wisata Lolong yang berusia relatif produktif.

Selain itu, masyarakat dengan usia yang produktif seharusnya dapat menjadi peluang dalam menciptakan iklim promosi yang baik. Pada konteks meningkatkan jumlah wisatawan, promosi perlu dilakukan secara berkala dan konsisten. Masyarakat Desa Lolong yang didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dengan dominasi pekerjaan petani membuat masyarakat Desa Lolong tidak mengerti teknologi sehingga tidak mampu mempromosikan produk-produk wisata dengan baik.

Hal tersebut terlihat dari tidak terdapat informasi apapun pada *website* Desa Wisata Lolong. Desa Lolong tidak memiliki *website* sendiri dan segala informasi mengenai atraksi pariwisata berada pada akun instagram masing-masing manajemen pengelolaan wisata. *Website* [jadesta.kemenparekraf.go.id](http://jadesta.kemenparekraf.go.id) merupakan kanal informasi desa wisata di seluruh Indonesia. Kendati demikian, informasi mengenai Desa Wisata Lolong pada situs *web* tersebut sangat minim. Sebaliknya, akun sosial media yang mengelola atraksi pariwisata Desa Wisata Lolong justru memberikan informasi yang lebih baik dari situs *web* Desa Wisata Lolong itu sendiri.

**Tabel 1. 6 Rentang Waktu Promosi Atraksi Desa Wisata Lolong**

| <b>Jenis</b>        | <b>Platform Promosi</b>                                                                                 | <b>Waktu Promosi</b>    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wisata Alam         | Instagram (@lolong_adventure)                                                                           | 1 Bulan Sekali          |
|                     | Instagram (@kebunduriansigarung.id)                                                                     | 1 Bulan Sekali          |
|                     | Instagram (@kebundurian.cahayabaru.lolong)                                                              | 2 Bulan Sekali          |
| Wisata Buatan       | Instagram (@buperlolongasri)                                                                            | 1 Bulan Sekali          |
|                     | Instagram (@sokolangitpekalongan)                                                                       | 1 Bulan Sekali          |
| Fasilitas Penunjang | Website ( <a href="https://jateng.jadesta.com/desa/lolong">https://jateng.jadesta.com/desa/lolong</a> ) | Tidak Pernah Diperbarui |

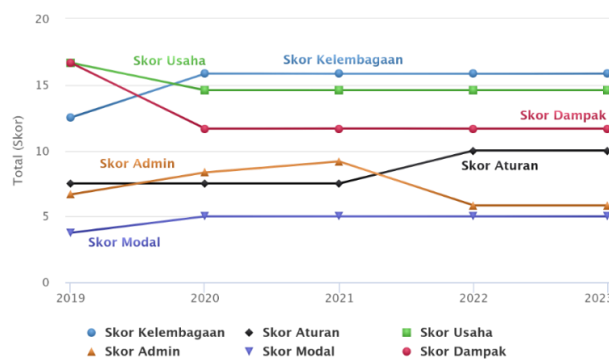
Promosi merupakan salah satu upaya meningkatkan jumlah wisatawan.

Menyebarkan informasi mengenai atraksi pada desa wisata dapat menciptakan keinginan wisatawan untuk berkunjung pada suatu desa wisata. Agusti (2021) pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai urgensi promosi dalam meningkatkan jumlah wisatawan, bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap minat pengunjung wisatawan. Penurunan dan peningkatan jumlah wisatawan dapat dipengaruhi oleh intensitas promosi yang dilakukan. Promosi dilakukan untuk mendorong peningkatan penjualan serta sebagai strategi. Pada konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan promosi wisata memiliki dampak positif terhadap citra wisata tersebut (Putri et al., 2024).

Tidak tersedianya informasi pada kanal informasi Desa Wisata tersebut merupakan dampak dari ketidaksiapan masyarakat dalam beradaptasi pada manajemen pengelolaan pariwisata. Hal tersebut karena Desa Lolong ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2021 sementara atraksi wisata sudah dilaksanakan sejak lama dengan manajemen pengelolaannya yang terpisah antara satu dengan

lain. Kendati demikian, terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai iklim kesiapan masyarakat yang baik tersebut, yaitu memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes Durian Mukti Lestari diciptakan atas inisiasi masyarakat yang didasarkan pada prinsip kooperatif, emansipatif, dan partisipatif (Hastutik et al., 2021). Hal tersebut dapat menjadi media masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasi yang berguna dalam pengembangan desa wisata (Riyan, 2023). Unsur partisipatif tersebut dilakukan guna mencapai prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Desa Wisata Lolong dalam mendapatkan manfaat dari pengelolaan wisata setempat, namun hal tersebut belum tercapai.



**Gambar 1. 2 Penilaian Klasifikasi BUMDes Desa Lolong**

BUMDes Durian Mukti Lestari Desa Lolong mendapatkan skor 62,9 dengan kriteria berkembang. Berdasarkan data tersebut, skor dampak pada pelaksanaan kegiatan oleh BUMDes Desa Wisata Lolong mengalami penurunan dan tidak ada perubahan pada kurun waktu 2020 hingga 2023. Begitu pula dengan skor usaha. Skor modal mengalami kenaikan pada kurun waktu 2019 hingga 2020 karena pada tahun tersebut, PT. PLN memberikan bantuan dalam pengembangan Desa Wisata Lolong, namun angka skor modal memiliki angka paling sedikit jika

dibandingkan dengan skor lain. Skor dampak yang stagnan menunjukkan bahwa BUMDes Desa Wisata Lolong belum mampu menyumbangkan dampak ekonomi yang substansial pada masyarakat. Terdapat tiga kriteria penilaian yang memiliki peran penting dalam pemberian manfaat kepada masyarakat lokal, yaitu kriteria dampak, modal, dan usaha.

**Tabel 1. 7 Skor pada Komponen Dampak, Modal, dan Usaha**

**BUMDes Desa Lolong**

| <b>Tahun</b><br><b>Penilaian</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dampak</b>                    | 16,67       | 11,67       | 11,67       | 11,67       | 11,67       |
| <b>Modal</b>                     | 3,75        | 5           | 5           | 5           | 5           |
| <b>Usaha</b>                     | 16,67       | 14,58       | 14,58       | 14,58       | 14,58       |

Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

Penilaian modal dan usaha berhubungan dengan kondisi pengelolaan BUMDes berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Penilaian dampak pada kriteria penilaian BUMDes berhubungan dengan kemanfaatan bagi masyarakat lokal. Tiga kriteria penilaian tersebut berhubungan dan mengandung tujuan yang sama, yaitu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Penilaian dampak pada kriteria tersebut salah satunya adalah dampak ekonomi yang mencakup penciptaan sinergi pada usaha yang dimiliki masyarakat. BUMDes dibangun atas dasar kesepakatan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan Hastutik (2021) bahwa tujuan dari pengelolaan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat, dan mengoptimalkan aset desa. Salah satu peran

BUMDes adalah memperkokoh perekonomian rakyat dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kesejahteraan ekonomi tersebut mencakup pendapatan masyarakat, peluang usaha, kesempatan kerja, dan taraf hidup (Rasyadi, 2021).

Perencanaan kegiatan oleh BUMDes dilakukan dengan beberapa prinsip yang satu di antaranya adalah prinsip partisipatif. Partisipasi masyarakat dapat terjadi atas banyak faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Masyarakat yang memiliki strata pendidikan rendah cenderung tidak memiliki pemahaman mengenai urgensi pengembangan wisata sehingga tidak berpartisipasi dalam penyampaian ide, gagasan, dan aspirasi pada kegiatan pengelolaan wisata (Ayu et al., 2024). Masyarakat Desa Wisata Lolong yang didominasi oleh tamatan SD menjadi salah satu faktor kurangnya pemahaman. Hambatan tersebut merambat pada hal lain seperti pelaksanaan promosi, pengelolaan fasilitas penunjang, dan keikutsertaan pada penyampaian ide, gagasan, serta partisipasi.

**Tabel 1. 8 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lolong**

| TINGKAT PENDIDIKAN | PRIA | WANITA | TOTAL |
|--------------------|------|--------|-------|
| Tidak Sekolah      | 12   | 12     | 24    |
| Belum Tamat SD     | 51   | 18     | 69    |
| SD                 | 293  | 32     | 325   |
| SLTP               | 102  | 14     | 116   |
| SLTA               | 68   | 5      | 73    |
| D1/D2              | 5    | 0      | 5     |
| D3                 | 2    | 0      | 2     |
| S1                 | 0    | 12     | 12    |

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diolah penulis

Tingkat pendidikan merupakan satu dari banyaknya faktor penghambat bagaimana masyarakat berpartisipasi, sedangkan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor eksternal yang turut memengaruhi partisipasi tersebut, sesuai pada Pasal 19 Peraturan Bupati No. 52 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025 menjelaskan partisipasi masyarakat menjadi strategi dari arah kebijakan pemberdayaan masyarakat guna mengembangkan potensi lokal. Uraian tersebut sesuai dengan yang dijelaskan Iyong et al. (2021) bahwa masyarakat yang terlibat dalam tahap pembangunan dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan, usia, dan status perkawinan, serta faktor eksternal seperti peran pemerintah dan kelompok masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi dan kurangnya ketertarikan penduduk dalam ikut serta dapat menjadi hambatan dalam pengembangan desa wisata. Perlu dilakukan analisis partisipasi guna menganalisis pada tingkat apa masyarakat Desa Wisata Lolong dalam berpartisipasi mengembangkan potensi yang berada di wilayah dan faktor pendorong dan penghambatnya. Endang (2021) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen utama yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata, sementara minimnya partisipasi masyarakat bisa menjadi satu dari banyaknya halangan bagi kemajuan desa wisata. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang muncul adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong masih rendah?

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada rapat koordinasi dan perencanaan Desa Wisata Lolong
2. Kurangnya ketertarikan masyarakat untuk membuka lapangan usaha di bidang pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata Lolong.
3. Rendahnya skor dampak, modal, dan usaha BUMDes Durian Mukti Lestari dalam optimalisasi kemanfaatan pengembangan Desa Wisata Lolong.
4. Sosial media yang pasif dan minimnya rentang waktu promosi atraksi Desa Wisata Lolong.
5. Jumlah wisatawan di Desa Wisata Lolong yang menurun secara drastis pada dua tahun terakhir.

Berdasarkan uraian mengenai identifikasi permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat masalah mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong.
2. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori yang relevan bagi penelitian-penelitian lain dengan fokus serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan terkait, khususnya terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan potensi pariwisata. Manfaat lain yang diharapkan adalah menyediakan referensi akademis baru di bidang administrasi publik.

##### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam perumusan perencanaan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata yang sesuai dengan tingkat partisipasi masyarakat Di Desa Wisata Lolong sehingga pengembangan potensi pariwisata yang lebih baik lagi.
2. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah media dalam melatih berfikir ilmiah serta menjadi hasil dari pembelajaran yang diperoleh pada masa kuliah.

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu metode untuk memperkaya wawasan tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata, sekaligus menjadi tambahan referensi bagi penelitian pada masa depan.

## 1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 9 State of Art**

| Penulis                                 | Artikel                                                                                                                | Landasan Teori                                                                                                                                                                                              | Hasil Temuan                                                                                                                                                                 | Pembandingan                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nahrowi, M. (2022)                      | “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan” | <b><i>Ladder of Participation</i></b><br>a. <i>Partnership</i><br>b. <i>Delegated power</i><br>c. <i>Citizen control</i>                                                                                    | Sebanyak 76,7% responden menunjukkan tingkat partisipasi yang sedang dan 95% dari responden berada pada tingkat kesejahteraan yang tinggi.                                   | Penelitian oleh M. Nahrowi ini dilakukan di empat Desa yang berada di Kecamatan Petungkriyono. Adapun lokus pada penelitian ini hanya berada pada satu desa wisata, yaitu Desa Wisata Lolong. |
| Endang, B. D., & Rukmana, S. N. (2021). | “Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kunjungan Wisata Alam Pantai Torong Besi”         | <b>Kunjungan Wisata</b><br>a. Daya tarik<br>b. Akseibilitas<br>c. Fasilitas<br><br><b><i>Ladder of Participation</i></b><br>d. <i>Partnership</i><br>e. <i>Delegated power</i><br>f. <i>Citizen control</i> | Berdasarkan 11 objek wisata yang telah dipetakan, terdapat indikator yang sudah memiliki tingkat partisipasi <i>Partnership</i> , satu indikator yang sudah memiliki tingkat | Penelitian ini hanya menggunakan tahap teratas dari <i>Ladder of Participation</i> . Adapun penelitian ini akan dibahas semua tingkatan dalam <i>Ladder</i>                                   |

|                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | partisipasi <i>Informing</i> , serta sembilan indikator yang sudah memiliki tingkat partisipasi <i>citizen control</i> .                                                                                                          | <i>of Participation</i> .                                                                                                                                            |
| Irfani, M., & Satlita, L. (2024) | “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar” | <b>Faktor yang Memengaruhi Pengembangan Desa Wisata:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Pendorong <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemauan</li> <li>- Kemampuan</li> <li>- Kesempatan</li> </ul> </li> <li>2. Faktor Penghambat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campuran <i>stakeholder</i></li> <li>- Usia</li> <li>- Jenis kelamin</li> <li>- Mata pencarian</li> <li>- Tingkat pendidikan</li> </ul> </li> </ol> | Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat di Desa Serang. Tiga faktor pendorong telah memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan terdapat enam faktor penghambat partisipasi. | Penelitian ini mengimplemen tasikan teori faktor yang memberikan pengaruh partisipasi masyarakat dalam merumuskan rumusan masalah dan tujuan kedua dalam penelitian. |
| I Gede Suhartawan (2021)         | “ <i>Local Community Participation In The Management Of The Marine Tourism In The Tumpapa Beach Of Malakosa Village</i> ”       | <b>Pengelolaan Wisata</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Motivasi dalam menciptakan kesejahteraan</li> <li>b. Simbiosis saling menguntungkan antara wisata dan masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                        | Terdapat tiga jenis partisipasi yang terjalin pada masyarakat Desa Malakosa, yaitu partisipasi ekonomi, partisipasi sosial budaya, dan bidang lingkungan.                                                                         | Penelitian ini mengimplemen tasikan teori partisipasi masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan teori <i>Ladder of Participation</i> .                           |

|                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                    | <b>Partisipasi Masyarakat</b><br><br>a. Keterlibatan mental dan emosi<br>b. Dukungan pada kehidupan kelompok<br>c. Tanggung jawab                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marianto (2020)                                         | “Peranan Pokdarwis Batu Rajeng untuk Mengembangkan Desa Sentiling Lombok Tengah”                                                   | <b>Desa Wisata</b><br><br>Pemanfaatan keunikan dan potensi suatu desa untuk menarik wisatawan.<br><br><b>Pokdarwis</b><br><br>Merupakan organisasi yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam mengelola desa wisata. | Pokdarwis memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata sebagai pihak yang merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pengembangan atraksi pariwisata di suatu desa wisata.         | Penelitian ini menerapkan konsep peran pokdarwis sebagai salah satu tanda dari kondisi partisipasi masyarakat di suatu desa wisata, karena Pokdarwis merupakan kelompok pemuda yang berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri. |
| Siregar, R. R. S., Hamidah, S., & Widayanto, B. (2022). | “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Pulesari di Dusun Pulesari Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.” | <b>Bentuk Partisipasi Masyarakat (Pasaribu dan Simanjuntak)</b><br><br>A. Partisipasi pemikiran<br>B. Partisipasi materi<br>C. Partisipasi tenaga<br>D. Partisipasi keterampilan                                                                       | Tingkat partisipasi masyarakat pada Desa Wisata Pulesari ada pada tingkatan partisipasi tinggi <i>citizen power</i> dengan bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi ide, pengadaan | Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai teori tingkat partisipasi masyarakat.                                                                                                                                               |

|                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                   | <b><i>Ladder of Participation</i></b><br><i>a. Partnership</i><br><i>b. Delegated power</i><br><i>c. Citizen control</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sarana, gotong royong, dan partisipasi keahlian.                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| Iyong, G., Moniaga, I., & Mandey, J. (2021). | “Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Likupang Timur” | <b>Pengelompokan Partisipasi Masyarakat</b><br><i>a. Partisipasi nyata</i><br>- Materi<br>- Tenaga<br>- Keahlian<br><i>b. Partisipasi tidak nyata</i><br>- Ide<br>- Pengambilan keputusan<br><br><b>Faktor pendorong dan penghambat Partisipasi Masyarakat (Cohen, 1997)</b><br><i>a. Faktor internal</i><br>- Jenis kelamin, usia<br>- Status dalam keluarga<br>- Pendidikan<br>- Pekerjaan<br>- Pendapatan<br><i>b. Faktor eksternal</i><br>- Pemerintah daerah<br>- Pengurus desa<br>- Lembaga masyarakat<br>- Yayasan sosial<br>- Perguruan tinggi | Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kecamatan Likupang Timur telah melibatkan diri pada berbagai tahapan Partisipasi tersebut dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. | Pemberian ini memberikan kontribusi pada faktor-faktor memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat. |

|                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                | - Tokoh masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
| Maulana, R., Purnama, M. R., & Rismawati, R. (2023) | “Partisipasi Masyarakat Desa Pedawang dalam Pengembangan Wisata Sipare Karanganyar Kabupaten Pekalongan”       | <b>Jenis Partisipasi Masyarakat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi ide/gagasan</li> <li>Partisipasi materiil</li> <li>Partisipasi tenaga</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     | Aspek partisipasi ide/gagasan memiliki persentas 50,83%. Aspek partisipasi materiil memiliki persentase 13,67%. Aspek partisipasi tenaga memiliki persentase 75,58%.            | Penelitian oleh Riyan Maulana ini hanya menganalisis partisipasi masyarakat secara keseluruhan, bukan menggunakan tangga tingkat partisipasi masyarakat.                               |
| Rasyadi, V., & Nasdian, F. T. (2021).               | “Hubungan Tingkat Partisipasi Masyarakat dengan Dampak Ekonomi Lokal dalam Pengembangan Kawasan Wisata Mandeh” | <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi pemikiran</li> <li>Partisipasi tenaga</li> <li>Partisipasi keterampilan</li> <li>Partisipasi barang</li> <li>Partisipasi uang</li> </ol> <b>Ekonomi Lokal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan masyarakat</li> <li>Peluang usaha</li> <li>Kesempatan kerja</li> </ol> Taraf hidup | Tingkat partisipasi masyarakat tinggi dengan nilai lebih dari 30%. Dampak atas keberadaan objek wisata memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal dengan nilai lebih dari 86,7%. | Penelitian ini membahas mengenai pengaruh tingkat partisipasi terhadap ekonomi lokal. Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai tingkat partisipasi pada pengembangan desa wisata. |
| Hamada, F., & Puspitasari, G. (2022)                | “Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan                                                | <b>Bentuk Partisipasi Masyarakat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi pikiran</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tingkat partisipasi masyarakat pada Desa Wisata Lamajang tergolong tinggi.                                                                                                      | Penelitian ini menegaskan bahwa dukungan pemerintah memberikan                                                                                                                         |

|  |                                          |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung.” | b. Partisipasi waktu<br>c. Partisipasi materi<br>d. Partisipasi tenaga<br>Partisipasi pembangunan | Hal tersebut terlihat dari persentase keikutsertaan masyarakat dalam empat tahap. | pengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat sehingga partisipasi masyarakat harus didukung oleh pengawasan dan dukungan pemerintah sebagaimana yang terdapat pada tingkat <i>manipulation</i> pada <i>Ladder of Participation</i> . |
|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Penelitian sebelumnya disusun untuk menjadi dasar dan pembeda dari berbagai kajian yang akan dilakukan dengan kajian lain yang sudah dilakukan sebelumnya dengan konsep yang sama. Pada *state of art* tersebut, beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Sudah terdapat penelitian terdahulu yang memiliki lokus di Kabupaten Pekalongan, yaitu penelitian berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa Pedawang dalam Pengembangan Wisata Sipare Karanganyar Kabupaten Pekalongan” dan Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan” Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata, namun penelitian tersebut bukan berfokus pada desa wisata melainkan hanya wisata yang terdapat pada suatu desa.

Berdasarkan uraian mengenai perbandingan tersebut maka peneliti melakukan pembaruan pada teori yang dipakai, yaitu teori tangga partisipasi Arnstein serta dengan lokus penelitian Desa Wisata Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Selain itu, dua penelitian tersebut belum membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat tingkat partisipasi masyarakat.

### **1.5.2. Administrasi Publik**

Pengertian dari administrasi publik adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari cara pemecahan masalah publik melalui berbagai penyempurnaan dan perbaikan di berbagai aspek seperti organisasi, sumber daya manusia, ataupun kebijakan. Chander dan Plano (dalam Sofyanoor, 2022) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh institusi dan organisasi publik yang melaksanakan proses organisasi dan koordinasi suatu hal guna mengelola, melakukan formulasi, serta mengimplementasikan seluruh keputusan pada konteks penerapan kebijakan publik. Owen Hughes (dalam Wulandari, 2020) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan mengenai pengelolaan *public sector*. Menurut Barton dan Chhappel (dalam Wulandari, 2020), administrasi publik adalah suatu bentuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh disposisi dari suatu birokrasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Rosenbloom (dalam Sofyanoor, 2022) bahwa administrasi publik sebagai penerapan teori serta proses manajerial, politik, dan hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam lingkup eksekutif.

Pada kategori politik, administrasi publik sering didefinisikan dengan “apa yang dilakukan pemerintah”. Menurut George J. Gordon, administrasi publik adalah kegiatan suatu organisasi atau individu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan undang-undang yang saat itu berlaku (Fadli, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan bahwa administrasi publik adalah proses yang dilaksanakan organisasi publik dalam rangka menerapkan berbagai kebijakan dan program. Adapun kebijakan dan program tersebut dilaksanakan di berbagai aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya adalah pengembangan wisata.

### **1.5.3. Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry (dalam Fadli, 2022) menyatakan bahwa terdapat lima paradigma dalam administrasi publik, yaitu:

#### *1. The Politics Administration Dichotomy (1900-1926)*

Model ini berfokus pada birokrasi pemerintahan. Hal tersebut terlihat jelas melalui pemisahan antara politik dan administrasi, di mana eksekutif dan legislatif berfungsi berdasarkan kewenangan masing-masing.

#### *2. The Principles of Administration (1927-1937)*

Dalam paradigma ini, ditetapkan prinsip-prinsip administrasi yang direalisasikan dengan para pegawai di bidang pemerintahan yang bekerja sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

#### *3. Public Administration as Political Science (1950-1970)*

Dalam paradigma ini, administrasi publik kembali fokus pada disiplin

ilmu politik. Hal ini berakibat pada hilangnya fokus administrasi publik sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

#### 4. *Public Administration as Management* (1956-1970)

Tahap ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip manajemen yang telah diterapkan dahulu pada paradigma sebelumnya.

#### 5. *Public Administration as Public Administration* (1970-Sekarang)

Dalam paradigma ini, para ahli administrasi publik menyerap berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu politik dan ilmu ekonomi dan menganggap bahwa administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang tak terpisahkan dari disiplin ilmu lainnya.

#### 6. *Governance* (1990-Sekarang)

Dalam paradigma ini, proses pengambilan keputusan dalam konteks administrasi publik harus dilakukan secara formal, berorientasi pada konsensus, dan dihasilkan dengan musyawarah. Kolaborasi dan proses melibatkan banyak pemangku kepentingan menjadi poin penting dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry tersebut, penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lolong Kabupaten Pekalongan” merupakan cerminan dari pelaksanaan paradigma *governance*. Orientasi pada konsensus terlihat dari partisipasi masyarakat di Desa Wisata Lolong dalam pengembangan desa wisata.

#### 1.5.4. Manajemen Publik

Satibi (2023) menjelaskan manajemen publik adalah cara pengelolaan sektor publik yang dilaksanakan dengan menyusun rencana, mengorganisasikan, mengendalikan, serta menerapkan strategi dan evaluasi terhadap sumber daya yang tersedia yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kekayaan sumber daya lain yang digunakan untuk meraih tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara manajemen publik dan kebijakan publik. Desrinelti (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah implementasi aturan melalui aksi, mekanisme, alur, ataupun tindakan yang dibingkai dalam sistem. Berikut merupakan tabel komparasi Manajemen Publik dan Kebijakan publik guna melakukan perbandingan:

**Tabel 1. 10 Tabel Perbandingan Paradigma**

| <b>Paradigma</b><br><b>Perbedaan</b> | <b>KEBIJAKAN PUBLIK</b>                                          | <b>MANAJEMEN PUBLIK</b>                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                        | Harmonisasi pelayanan publik                                     | Efektivitas dan efisiensi sumber daya                 |
| <b>Sasaran</b>                       | Pemerintah, masyarakat, dan aktor yang terlibat dalam kebijakan. | Sumber daya (manusia, anggaran, fasilitas, dan IPTEK) |
| <b>Penerapan</b>                     | Mekanisme, alur, aksi, dan tindakan pemerintah.                  | Proses mengkoordinir dan mengintegrasikan aktivitas.  |
| <b>Output</b>                        | Kebijakan sebagai solusi permasalahan masyarakat                 | Strategi mengorganisasikan sumber daya.               |

Satibi (2023) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan suatu proses mengelola sesuatu yang terikat pada sektor publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh *public organization* dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, menyusun strategi, serta mengevaluasi segala sumber daya yang dimiliki termasuk dana, sarana dan prasarana, IPTEK, dan hal lain yang dilakukan guna pencapaian tujuan. Penerapan manajemen pada sektor publik dilakukan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dengan cara pengaturan sumber daya dan anggaran agar sesuai dengan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai tabel perbandingan tersebut, manajemen publik dilakukan untuk melakukan koordinasi dan integrasi aktivitas dalam suatu pekerjaan agar mencapai efisiensi dan efektivitas. Partisipasi masyarakat memiliki makna perwujudan peran masyarakat dalam suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan masyarakat sehingga pada penelitian ini partisipasi masyarakat merupakan bagian dari manajemen publik.

#### **1.5.5. Pemberdayaan Sosial**

Ariani & Rahaju (2023) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang pelaksanaannya meliputi pemberian motivasi, dorongan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang dimiliki dalam rangka menumbuhkan kekuatan masyarakat tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pendidikan yang pelaksanaannya berbasis kemasyarakatan. Segala kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan urgensi yang dialami oleh beberapa kelompok masyarakat yang berbeda.

Kebutuhan serta permasalahan tersebut memerlukan upaya yang berbeda dan perlu disesuaikan. Perwujudan upaya tersebut sesuai dengan definisi pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan segala upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam rangka menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang mandiri dengan meningkatkan kekuatan dari sumber daya lokal (Tifani Azzahrah et al., 2023)

Pada pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang merujuk pada berbagai bidang di kehidupan, yang termasuk di dalamnya adalah bidang ekonomi (Zheng, 2020). Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu konsep pengembangan yang pelaksanaannya dilakukan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi lokal (Ramdhani & Rahaju, 2022).

Pada konteks pelaksanaan pemberdayaan pada suatu masyarakat, kegiatan yang diberikan harus disesuaikan dengan urgensi yang dimiliki serta dan oleh suatu kelompok masyarakat terkait. Tifani Azzahrah et al (2023) mendefinisikan beberapa permasalahan yang dapat menjadi landasan dari pelaksanaan pemberdayaan, yaitu:

- 1) *Poverty*, kesenjangan dan permasalahan ekonomi.
- 2) Akses terhadap modal yang terbatas
- 3) SDM dengan kualitas tidak mumpuni
- 4) Tidak ada kebijakan yang terintegrasi

Ariani & Rahaju (2023) membagi pemberdayaan masyarakat menjadi tiga proses, yaitu:

1. *Enabling* (Pemungkinan)

Proses ini mengacu pada penciptaan lingkungan dan suasana yang dapat menumbuhkan suatu bentuk sumber daya yang dapat dimaksimalkan dari suatu kelompok masyarakat untuk berkembang. Pada tahap ini, dilaksanakan suatu proses, yaitu merencanakan program yang melibatkan masyarakat. Pemberian motivasi, dorongan, dan upaya pembangkitan kesadaran juga diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi tersebut (Ghozali & Rahaju, 2023).

2. *Empowering* (Penguatan)

Proses ini mengacu pada penguatan potensi yang dimiliki dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat. Pada tahap ini, langkah yang dapat diambil adalah memberikan *input* kepada masyarakat guna mendapatkan *opportunities* yang lebih besar.

3. *Protecting* (Perlindungan)

Proses ini mengacu pada upaya perlindungan terhadap masyarakat lemah dari persaingan yang tidak seimbang (Ghozali & Rahaju, 2023). Sebagai proses terakhir dari pemberdayaan masyarakat, perlindungan tersebut dilakukan guna mempertahankan keberlanjutan dari berbagai kegiatan.

Pada konteks melaksanakan proses tersebut, perlu diterapkan berbagai metode pemberdayaan masyarakat. Mardikanto (2019) menjelaskan bahwa terdapat enam metode pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif, yaitu:

1. *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu metode yang dilaksanakan dengan mengobservasi atau mengamati lapangan secara langsung guna

mengumpulkan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Partisipasi pada metode ini dilakukan oleh fasilitator atau pelaksana kegiatan itu sendiri.

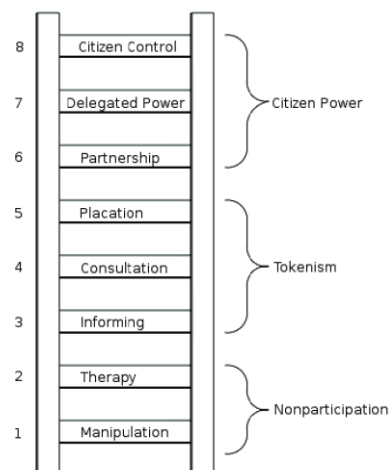
2. *Participatory Rapid Appraisal* (PRA), yaitu metode yang merupakan penyempurnaan dari RRA. Pada metode ini dilakukan pelibatan peran *stakeholder* dan masyarakat.
3. *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu metode yang dilaksanakan dengan membuka forum diskusi terarah yang melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat guna mengidentifikasi isu-isu pokok sesuai dengan tujuan kegiatan.
4. *Participatory Learning and Action* (PLA), yaitu metode yang dilaksanakan dengan menitikberatkan pada proses praktik dan belajar. Penerapan metode ini akan mengantarkan masyarakat untuk bisa memahami unsur pemberdayaan melalui aksi nyata.
5. *Farmers Field School* (FFC), yaitu metode yang dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pertemuan secara berkala bersama kelompok masyarakat guna membahas masalah yang dihadapi.
6. Pelatihan Partisipatif, yaitu metode yang mengacu pada kebutuhan sehingga segala proses maupun kegiatan pemberdayaan di dalamnya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada konteks ini, kegiatan tersebut harus memberikan manfaat lebih kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut maka pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai pemberian kekuatan kepada suatu kelompok

masyarakat untuk bertanggungjawab atas kegiatan yang mereka kerjakan yang dilakukan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan tersebut secara mandiri dan berkepanjangan. Pada konteks ini, metode pemberdayaan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat itu sendiri sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan pemberdayaan (Mardikanto, 2019).

#### **1.5.6. Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah rekognisi dan kesanggupan masyarakat untuk mengajukan diri dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan implementasi dari suatu program yang memiliki konteks pembangunan Fauziah & Nasdian (2021). Simatupang mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai kerja sama yang dilaksanakan guna pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama diantara berbagai jenis latar belakang serta kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat (Latif et al., 2019). Partisipasi masyarakat adalah kesanggupan masyarakat pada segala kegiatan identifikasi permasalahan, pengambilan keputusan, melaksanakan keputusan dan mengevaluasi implementasi keputusan (Wijana, 2019).



**Gambar 1. 3 *Ladder of Participation***

Sumber: Arnstein (dalam Ariani & Rahaju, 2023)

Partisipasi masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut dapat diukur melalui beberapa tingkatan. Arnstein membagi partisipasi masyarakat menjadi beberapa tingkatan dalam *Ladder of Participation* (dalam Mariyani & Lestari, 2023). Tingkatan tersebut, yaitu:

1. *Non-Participation*

- a. *Manipulation*, pada tingkatan ini belum ada partisipasi dari masyarakat dan masyarakat tidak mengetahui informasi sehingga tidak memahami manfaat dari program atau kegiatan tersebut.
- b. *Therapy*, pada tingkatan ini masyarakat telah mengetahui manfaat dari program atau kegiatan tersebut.

2. *Tokenism*

- a. *Informing*, pada tingkatan ini masyarakat telah mendapatkan informasi yang diberikan secara satu arah sehingga masyarakat hanya mengetahui

informasi dari hasil keputusan yang telah dibuat tanpa ikut berpartisipasi di dalamnya.

- b. *Consultation*, pada tingkatan ini masyarakat telah melaksanakan kegiatan sekaligus telah mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi dari masyarakat walau tidak ada kepastian bahwa aspirasi tersebut akan dilaksanakan.
- c. *Placation*, pada tingkatan ini masyarakat telah memberikan aspirasi namun hanya sebagian dari aspirasi tersebut yang diterima.

### 3. *Citizen Control*

- a. *Partnership*, pada tingkatan ini masyarakat telah ikut serta dalam kerja sama dengan *stakeholder* lain dan inisiasi dari kerja sama tersebut datang dari masyarakat itu sendiri.
- b. *Delegation*, pada tingkatan ini masyarakat telah mendominasi proses pembuatan keputusan yang mencakup tahap membuat rencana, melaksanakan kegiatan, mengoperasikan, melaksanakan tanggung jawab, serta melakukan pemeliharaan.
- c. *Citizen Control*, pada tingkatan ini masyarakat telah mencapai partisipasi publik yang ideal. Inisiasi sepenuhnya datang dari masyarakat dalam seluruh tahapan yang mencakup tahap kegiatan.

Fatimah & Pujiarto (2019) menegaskan bahwa analisis tingkat partisipasi masyarakat dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat penting dikaji guna mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam menerima

dan mengelola seluruh kegiatan dan program dalam pengembangan pariwisata tersebut (Endang, 2021).

#### **1.5.7. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat pada suatu kegiatan terpengaruh oleh beberapa faktor. Faktor yang memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yang artinya memiliki daya dukung dan bersifat negatif yang artinya mempunyai daya hambat (Widiastuti & Nurhayati, 2019),

Wastiti (2020) menjelaskan bahwa terdapat faktor pendorong partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Kemauan

Faktor kemauan adalah sesuatu yang dapat mendorong individu dalam melakukan partisipasi (Wastiti et al., 2020). Faktor ini muncul dari masing-masing individu yang ingin berpartisipasi secara sukarela dengan didasari atas kepercayaan diri terhadap program atau kegiatan tersebut.

2. Kemampuan

Faktor kemampuan adalah keterampilan yang dimiliki masyarakat mengenai suatu program atau kegiatan (Widyasari et al., 2022). Kemampuan menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat karena masyarakat yang memiliki beragam kemampuan seperti keterampilan dalam mengelola pariwisata

3. Kesempatan

Faktor kesempatan merujuk pada peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan suatu kegiatan.

(Poetradewa, 2023). Kesempatan tersebut dapat membentuk solidaritas dan integritas sosial masyarakat.

Deviyanti (dalam Irfani, 2024) menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Campur Tangan *Stakeholder*

Berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam suatu program atau kegiatan memiliki tugas dan kepentingan yang berbeda. Dominasi *stakeholder* dapat memengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada suatu program atau kegiatan.

2. Usia

Faktor usia adalah salah satu faktor pendorong dan penghambat sikap individu pada suatu kegiatan atau program (Wastiti et al., 2020). Individu dengan usia produktif cenderung bersemangat untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan. Sebaliknya, individu dengan usia tidak produktif kurang tertarik untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan.

3. Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin menjadi satu dari beberapa faktor penghambat dalam keikutsertaan masyarakat. Adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan dan derajat seorang individu menciptakan gap antara hak dan kewajiban antara pria dan wanita (Irfani, 2024).

4. Mata Pencarian

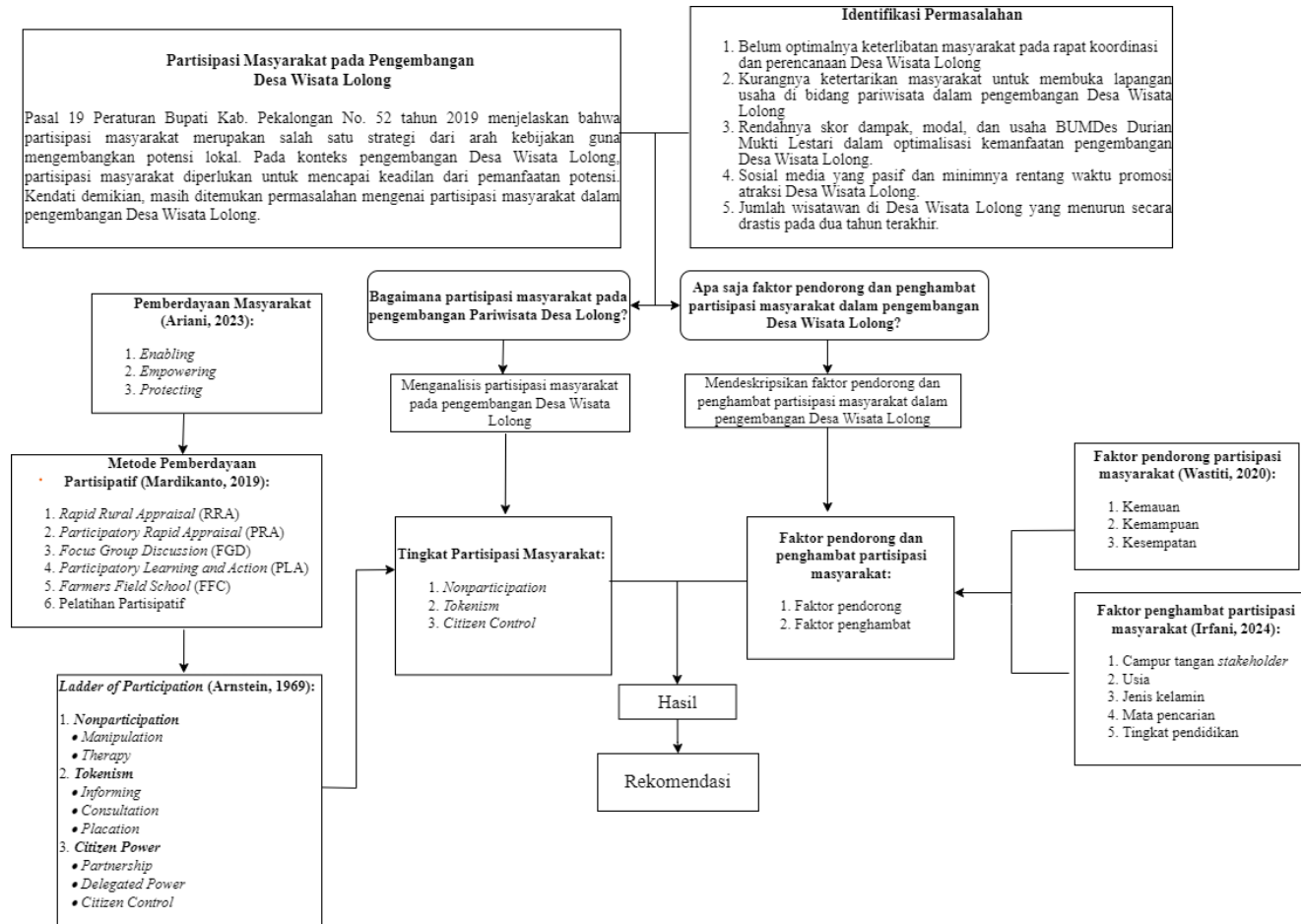
Mata pencarian berdampak pada waktu luang yang dimiliki oleh seseorang dalam melibatkan dirinya pada suatu kegiatan. Masyarakat yang telah

memiliki kesibukan oleh pekerjaan utama cenderung tidak memiliki waktu untuk mengikuti suatu pertemuan dan kegiatan.

#### 5. Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan informasi. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan rendah tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai urgensi kegiatan dan tidak menganggap penting kegiatan tersebut.

Gambar 1. 4 Kerangka Pemikiran Teoritis



## 1.6. Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan penduduk atau masyarakat Desa Lolong pada mengembangkan sekaligus memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Partisipasi dilakukan dengan suka rela ikut serta dalam segala kegiatan, namun masyarakat tidak sepenuhnya memiliki wewenang pada seluruh tingkat partisipasi. Tingkatan partisipasi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Non-Participation*

- a. *Manipulation*, tidak terdapat partisipasi masyarakat pada tingkat partisipasi *manipulation*. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata sepenuhnya dipegang oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai pengembangan Desa Wisata Lolong.
- b. *Therapy*, belum terdapat partisipasi masyarakat pada tingkat partisipasi *therapy*. Pemerintah telah memberikan informasi mengenai manfaat pengembangan Desa Wisata Lolong kepada masyarakat sehingga pada tingkatan ini, masyarakat telah mengetahui manfaat dan urgensi pengembangan Desa Wisata Lolong.

#### 2. *Tokenism*

- a. *Informing*, belum terdapat partisipasi masyarakat pada tingkat partisipasi *informing*. Informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pengembangan Desa Wisata hanya diberikan secara satu arah tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

- b. *Consultation*, Sudah terdapat partisipasi masyarakat pada tingkat partisipasi *consultation*. Masyarakat telah dilibatkan dalam memberikan pendapat namun tidak ada kepastian bahwa pendapat tersebut akan diterima dan dilaksanakan dalam pengembangan Desa Wisata Lolong.
- c. *Placation*, Sudah terdapat partisipasi masyarakat pada tingkat partisipasi *placation*. Sebagian dari pendapat dan aspirasi yang diberikan masyarakat telah diterima dan dinilai kelayakan aspirasi tersebut untuk dilaksanakan dalam pengembangan Desa Wisata Lolong.

### 3. *Citizen Control*

- a. *Partnership*, Sudah terdapat partisipasi masyarakat pada tingkat partisipasi *partnership*. Inisiasi dalam melakukan kerja sama datang dari masyarakat Desa Wisata Lolong.
- b. *Delegation*, Sudah terdapat partisipasi masyarakat pada tingkat partisipasi *delegation*. Pada tingkat ini, masyarakat Desa Lolong telah mendominasi proses pengambilan keputusan. Masyarakat telah memiliki wewenang namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah.
- c. *Citizen Control*, Masyarakat telah sepenuhnya mencapai partisipasi yang ideal. Pada tingkat partisipasi ini, inisiasi datang sepenuhnya dari masyarakat dalam proses pembuatan rencana, melaksanakan kegiatan, mengoperasikan kegiatan, pembagian tanggung jawab, serta melakukan pemeliharaan terhadap segala kegiatan pengembangan Desa Wisata Lolong.

Adapun rincian mengenai operasionalisasi konsep partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong adalah:

**Tabel 1. 11 Operasionalisasi Konsep  
Tingkat Partisipasi Masyarakat**

| <b>FENOMENA</b>                                                      | <b>GEJALA</b>      | <b>SUB GEJALA</b>                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Lolong | Partisipasi Rendah | 1. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata sepenuhnya dipegang oleh pemerintah                    |
|                                                                      |                    | 2. Pemerintah telah memberikan informasi mengenai pengembangan Desa Wisata Lolong                  |
|                                                                      | Partisipasi Sedang | 1. Informasi yang diberikan kepada masyarakat hanya satu arah                                      |
|                                                                      |                    | 2. Masyarakat mendapatkan kesempatan berpartisipasi tanpa ada kepastian aspirasi akan dilaksanakan |
|                                                                      |                    | 3. Sebagian aspirasi sebagai bentuk partisipasi telah dilaksanakan                                 |
|                                                                      | Partisipasi Tinggi | 1. Sudah dilaksanakan kerjasama dengan pihak luar                                                  |
|                                                                      |                    | 2. Masyarakat telah mendominasi proses pelaksanaan pengembangan desa wisata                        |
|                                                                      |                    | 3. Inisiasi pengembangan desa wisata sepenuhnya datang dari masyarakat                             |

#### **1.6.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan penduduk atau masyarakat pada segala kegiatan mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi pelaksanaan keputusan. Segala proses tersebut dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong adalah faktor

yang bersifat positif yang berhubungan dengan kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang dimiliki Masyarakat Desa Lolong yang membuat masyarakat Desa Lolong termotivasi untuk berpartisipasi. Faktor penghambat adalah kondisi yang bersifat negatif yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa menjadi hambatan Masyarakat Desa Lolong dalam berpartisipasi.

**Tabel 1. 12 Operasionalisasi Konsep**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Tingkat Partisipasi Masyarakat**

| FENOMENA                                               | GEJALA            | SUB GEJALA                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat | Faktor Pendorong  | 1. Keinginan dalam diri masyarakat itu sendiri                      |
|                                                        |                   | 2. Pengetahuan dan keahlian                                         |
|                                                        |                   | 3. Peluang dan integritas sosial dalam masyarakat                   |
|                                                        | Faktor Penghambat | 1. Campur tangan <i>stakeholder</i>                                 |
|                                                        |                   | 2. Produktivitas masyarakat berdasarkan usia                        |
|                                                        |                   | 3. Pandangan mengenai perbedaan kewajiban berdasarkan jenis kelamin |
|                                                        |                   | 4. Mata pencarian yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat           |
|                                                        |                   | 5. Pembagian peran berdasarkan tingkat pendidikan                   |

**1.7. Argumen Penelitian**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat pada suatu program atau kegiatan. Pada pengembangan Desa Wisata Lolong, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat pada mengelola segala program pengembangan Desa Wisata Lolong. Fakta bahwa organisasi Lolong *Adventure* yang

memprakarsai wisata *rafting* sudah berdiri sejak 2011 dan Festival Durian Lolong yang sudah berlangsung sejak 2010 sementara SK Bupati Kabupaten Pekalongan ditetapkan pada 2021 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lolong sudah mampu menciptakan iklim pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kajian teori, bahwa salah satu aspek pemberdayaan masyarakat adalah mempertahankan keberlanjutan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memandang partisipasi sebagai satu dari banyaknya strategi dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada sektor kepariwisataan. Partisipasi merupakan faktor keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merujuk pada fakta bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan adalah kemandirian dan hal tersebut dapat dicapai apabila terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya. Kabupaten Pekalongan telah menetapkan partisipasi sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 19 Peraturan Bupati Pekalongan No. 52 Tahun 2019.

Kendati demikian, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan mengenai pengembangan Desa Wisata Lolong masih minim. Selain itu, hanya sedikit UMKM yang bergerak pada bidang pariwisata dari total keseluruhan UMKM di Desa Wisata Lolong. Pengorganisasian atraksi Desa Wisata Lolong masih dilakukan secara mandiri dan tidak terdapat pembagian wewenang dalam memaksimalkan sumber daya. Selain itu, tidak terdapat kanal yang menyediakan informasi mengenai Desa Wisata Lolong. Informasi mengenai atraksi Desa Wisata Lolong dilakukan pada sosial media masing-masing

manajemen pariwisata. Terjadi penurunan skor dampak pada skor penilaian BUMDes Desa Lolong. Pada konteks ini, pengelolaan BUMDes seharusnya mengikutsertakan masyarakat demi tercapainya keadilan yang dapat dilihat dari skor dampak tersebut. Partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dengan membangun kerja sama dengan masyarakat sehingga seluruh kegiatan dapat mendukung pengembangan suatu desa wisata (Siregar, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Lolong sehingga dapat direkomendasikan langkah-langkah yang dapat meningkatkan keberlanjutan pariwisata tersebut. Analisis tingkat partisipasi masyarakat akan dilakukan dengan analisis melalui teori *Ladder of Participation*. Teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat delapan tingkat partisipasi masyarakat, yaitu *manipulation* hingga *citizen control*. Akan dilakukan deskripsi mengenai faktor-faktor pada tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wisata Lolong. Terdapat 13 informan yang terdiri dari kalangan masyarakat, pengambil kebijakan, hingga media untuk memperoleh informasi tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Lolong.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sujarweni (dalam Wiratna, 2014) menjelaskan bahwa Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan prosedur statistik berdasarkan analisis tertentu. Abdussamad (dalam Zuchri, 2021) menegaskan tentang pendekatan kualitatif adalah

penelitian yang meneliti situasi ilmiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan analisis data yang bersifat induktif.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang digunakan dengan memahami situasi dari suatu fenomena individu atau kelompok yang terkait dengan suatu permasalahan sosial. (Cresswell, 2013). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis fenomena sosial pada kondisi alami yang berjalan secara ilmiah, bukan dalam situasi yang terkontrol. Penelitian kualitatif menciptakan prosedur analisis yang tidak melibatkan prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya (Moleong, 2017).

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang mengilustrasikan objek penelitian sebagaimana adanya. (Arikunto, 2013). Tipe penelitian deskriptif dilakukan untuk mencari penjelasan mengenai fenomena atau gejala sosial berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Fenomena yang digambarkan pada penelitian deskriptif mencakup karakteristik, aktivitas, and hubungan antar manusia pada suatu fenomena (Iskandar, 2010).

Pada penelitian ini, akan dilakukan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis fenomena partisipasi masyarakat Desa Wisata Lolong secara komprehensif dan mendalam. Akan dilakukan deskripsi mengenai aktivitas partisipasi masyarakat Desa Wisata Lolong yang akan digambarkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Uraian tersebut kemudian akan merujuk pada suatu fenomena partisipasi masyarakat pada suatu tingkatan.

### 1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi dilaksanakannya proses penelitian untuk mendapatkan pemecahan masalah pada penelitian yang berlangsung (Darmadi, 2014). Pemecahan masalah tersebut adalah fokus dari penelitian. Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Lolong. Pada konteks pengambilan data mengenai fokus tersebut, perlu dilakukan penentuan lokus penelitian. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa lokus penelitian adalah tempat fenomena tersebut akan diteliti. Penelitian ini mengambil lokus pada Desa Wisata Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

### 1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian kualitatif adalah informan. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa subjek penelitian merujuk pada pihak yang terlibat dengan objek penelitian (informan atau narasumber) untuk memperoleh informasi terkait data penelitian, yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa subjek penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian sehingga harus dipersiapkan secara matang sebelum proses pengumpulan data berlangsung. Menurut Iskandar (2010), subjek penelitian harus bisa mewakili fenomena yang hendak diteliti.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* merupakan proses pemungutan sampel didasari oleh berbagai peninjauan sesuai dengan kriteria informasi yang

diinginkan dalam melaksanakan penelitian. Pemilihan *purposive sampling* sebagai penentuan informan didasari oleh kepemilikan informasi mengenai pengembangan Desa Wisata Lolong dan iklim partisipasi yang hanya dimiliki oleh segelintir pengurus desa beserta jajaran pengurus atraksi pariwisata. Beberapa di antaranya terbagi menjadi tiga informan, yaitu informan kunci, informan primer, dan informan sekunder.

Uraian mengenai informan pada penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lolong Kabupaten Pekalongan” adalah:

1. Informan Kunci

- a. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan. Institusi ini memiliki tugas melakukan perumusan kebijakan teknis pada bidang pengembangan destinasi wisata. Dinporapar Kabupaten Pekalongan memegang peranan penting mengenai penentuan arah kebijakan pariwisata di Kabupaten Pekalongan termasuk pengembangan wisata di Desa Wisata sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
- b. Kepala Desa Lolong. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintah pada level desa, Kepala Desa Lolong memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan

pengembangan wisata. Selain itu, Kepala Desa Lolong merupakan pihak yang menjadi media antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Desa Lolong dalam melaksanakan serta menyampaikan kebijakan pengembangan pariwisata.

- c. Ketua BUMDes Desa Wisata Lolong. Badan Usaha Milik Desa memiliki tugas untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan ekonomi berdasarkan potensi desa. Salah satu tujuan pengembangan Desa Wisata Lolong adalah meningkatkan perekonomian masyarakat lokal sehingga pemilihan Ketua BUMDes selaku informan dinilai sesuai dengan fokus penelitian.

## 2. Informan Primer

- a. Pokdarwis Desa Lolong. Organisasi kelompok sadar wisata merupakan pihak yang melaksanakan kebijakan pengembangan wisata secara *top-down* maupun *bottom-up*. Sebagai pihak pelaksana kegiatan, Pokdarwis Desa Lolong memahami kendala serta dorongan pengembangan Desa Wisata Lolong karena Podarwis Desa Lolong terlibat secara langsung dalam pengembangan wisata sekaligus menjadi pihak yang memahami situasi terkini pada Desa Wisata Lolong.
- b. Karang Taruna Desa Lolong. Organisasi Karang Taruna adalah organisasi pemuda yang merupakan bagian dari anggota masyarakat setempat. Karang Taruna adalah bagian dari pihak yang terkena pengaruh atas program pengembangan pariwisata. Selain itu, Karang

Taruna juga merupakan pihak yang memahami kondisi terkini mengenai pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lolong.

- c. Masyarakat Desa Lolong. Analisis tingkat partisipasi masyarakat harus menjadikan masyarakat sebagai informan terpenting. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif sangat dipengaruhi oleh kemauan masyarakat dalam mengikuti segala kegiatan pengembangan Desa Wisata Lolong. Pada konteks ini, masyarakat Desa Lolong menjadi sasaran kebijakan karena segala kebijakan mengenai pengembangan Desa Wisata Lolong akan sangat berdampak pada masyarakat lokal. Pemilihan informan masyarakat Desa Lolong akan dilakukan dengan memilih pelaku UMKM, pemilik kafe, petani durian, dan masyarakat lokal lain.

### 3. Informan Sekunder

- a. Masyarakat Luar. Wisatawan yang berkunjung pada suatu tempat wisata memiliki pandangan terhadap pelaksanaan pengelolaan wisata pada tempat wisata tersebut. Pengunjung Desa Wisata Lolong merupakan sumber pendapatan lebih bagi masyarakat sehingga masyarakat luar sebagai pengunjung Desa Wisata Lolong mengetahui pelaksanaan pengelolaan atraksi wisata yang dilakukan oleh masyarakat lokal Desa Wisata Lolong ataupun pihak lain.
- b. Media. Media memiliki peran dalam menyampaikan suatu informasi. Media juga berperan dalam mempromosikan kegiatan pariwisata. Wartawan Tribun Jateng merupakan media yang memberitakan

informasi tentang segala pelaksanaan pengembangan pariwisata di Desa

Wisata lolong, salah satunya adalah Festival Durian Lolong.

Informan pada penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lolong Kabupaten Pekalongan” adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 13 Informan Penelitian**

| NO    | INFORMAN                                                        | JUMLAH INFORMAN |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan | 1               |
| 2     | Kepala Desa Lolong                                              | 1               |
| 3     | Ketua BUMDes Desa Lolong                                        | 1               |
| 4     | Pokdarwis Desa Lolong                                           | 1               |
| 5     | Karang Taruna Desa Lolong                                       | 1               |
| 6     | Masyarakat Desa Lolong                                          | 3               |
| 7     | Masyarakat luar                                                 | 1               |
| 8     | Media                                                           | 1               |
| Total |                                                                 | 10              |

**Keterangan:**

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
2. Kepala Desa Lolong
3. Pengelola BUMDes Desa Lolong
4. Ketua Pokdarwis Desa Lolong
5. Ketua Karang Taruna Desa Lolong
6. Masyarakat Desa Lolong
7. Masyarakat luar pengunjung Desa Wisata Lolong
8. Media

#### **1.8.4. Jenis Data**

Sugiyono (2022) membagi jenis data menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dengan formasi angka serta dapat dihitung. Adapun data kualitatif adalah jenis data yang berbentuk kalimat, gambar, serta skema yang bukan berbentuk angka. Penelitian ini menerapkan jenis data kualitatif, yang jenis data tersebut didapatkan dari wawancara dengan informan yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa jenis data kualitatif yang akan dipakai pada penelitian ini, yaitu:

- a. Data Tertulis, yang mencakup perundang-undangan yang mengatur kebijakan pengembangan desa wisata serta hasil dari penelitian terdahulu.
- b. Data Gambar, yang mencakup foto yang menunjukkan kondisi dan situasi sebenarnya di lapangan untuk mendukung proses analisis data.
- c. Data Statistik, yang berupa diagram, tabel, dan grafik berisi informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk mendukung dan memperkuat analisis penelitian.
- d. Kata-Kata dan Tindakan Informan, yang berupa hasil wawancara bersama informan yang berisi informasi penting mengenai pengembangan Desa Wisata Lolong. Jenis data ini juga termasuk analisis setelah pelaksanaan observasi atau pengamatan lapangan.

### **1.8.5. Sumber Data**

Arikunto (2013) menjelaskan bahwa sumber data adalah subjek yang mencakup data yang didapat. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa sumber data terbagi menjadi berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data tersebut didapat dengan melakukan wawancara, diskusi, pengamatan, dan analisis dokumen. Adapun data primer pada penelitian ini akan dikumpulkan dengan melaksanakan wawancara dengan informan atau narasumber.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang didapatkan dengan tidak langsung namun tetap berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan menganalisis penelitian terdahulu, dokumen dari instansi terkait, studi kepustakaan, serta data pendukung yang berasal dari media elektronik.

### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan bagian dari tahapan pengumpulan data sesuai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebagai satu dari banyaknya teknik pengumpulan data dengan pelaksanaannya memiliki tujuan untuk mencari tahu suatu hal yang diharapkan dapat didapat dari responden dengan pembahasan yang mendalam (Sugiyono, 2022). Wawancara dilakukan dengan komunikasi dua arah antara pewawancara dan narasumber. Penerapan teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa wawancara terstruktur merupakan bagian dari *in-depth interview*.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi tidak hanya terbatas pada individu namun juga berfokus pada objek lain pada suatu tempat atau fenomena (Sugiyono, 2022). Observasi dilakukan guna mengetahui tingkah laku non verbal terhadap objek dalam suatu fenomena sosial yang diteliti. Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan kondisi peran serta masyarakat Desa Wisata Lolong dalam pengembangan potensi pariwisata. sebagai pelaksanaan observasi.

c. Studi Pustaka

Pelaksanaan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada penelitian terdahulu, internet, serta informasi lain yang berkaitan dengan fokus penelitian guna memperkuat analisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lolong.

d. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilaksanakan dengan mengambil informasi berupa foto, video, dan informasi yang bersumber dari dokumen lain yang digunakan untuk mengetahui keadaan dan kondisi lapangan pada masa kini maupun masa lalu untuk memperkuat proses analisis.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Moleong (2017) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengelompokkan data pada pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan pola dan dapat dianalisis. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah analisis, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pemusatan perhatian dan penyederhanaan terhadap informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ini dilakukan terhadap informasi dan data kasar yang memiliki kompleksitas tinggi. Data tersebut lalu disederhanakan hingga hanya berupa hal-hal mengenai topik penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun uraian singkat mengenai jejaring antar informasi yang telah didapatkan. Penyajian tersebut berupa teks yang bersifat naratif.

### 3. Verifikasi Data

Tahap ini dilakukan dengan penyusunan kesimpulan dan melakukan konfirmasi terhadap informasi yang telah dianalisis. Informasi tersebut diuji kebenarannya melalui data dukung lain seperti hasil observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang diambil berdasarkan verifikasi tersebut akan menghasilkan informasi yang akurat bagi peneliti.

#### 1.8.8. Kualitas dan Validitas Data

Moleong (2017) menjelaskan bahwa terdapat empat kriteria keabsahan data yang memengaruhi kualitas data, yaitu : (1) *Credibility*, yang pelaksanaannya dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan di lapangan, (2) *Transferability*, yang dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dengan kejadian empiris lain yang memiliki persamaan, (3) *Dependability*, yang dilakukan dengan *auditing*, dan (4) *Confirmability*, yang berarti data dapat dikonfirmasi dengan data lain yang absah.

Aspek pertama, yaitu *credibility* dapat dicapai dengan dua teknik, yaitu:

##### 1. Triangulasi Sumber

Teknik ini dilaksanakan dengan pengumpulan data dari sumber yang berbeda untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan hingga mendapatkan data yang kredibel mengenai kondisi fenomena tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wisata Lolong.

## 2. Triangulasi Teknik

Penerapan teknik ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang berasal dari sumber yang sama demi mendapatkan data yang berbeda. Triangulasi teknik dapat dilaksanakan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang sama.